

Middle Income Trap: Mengapa Indonesia Sulit Menembus Major Power Global?

Muhammad Muslim

Universitas Paramadina

Abstract

The projection of Indonesia as the country with the fourth-largest economic power in 2045 has become one of the most widely discussed discourses, especially in the second term of President Joko Widodo's administration. The main argument is that Indonesia will receive a demographic dividend. Regarding economic material capacity, Indonesia's contribution to the global economy based on GDP, for example, is still far behind that of major powers. Indonesia's economic development exposure will not increase exponentially if it only relies on GDP growth. Indonesia's GDP in 2023 is equivalent to Italy's GDP in 2002. This means that Indonesia must wait a long time, or at least 21 years, until 2045 to become a new world economic power. This article tries to offer a conceptual idea that Indonesia must take first to realize its ambition as a new world power. Instead of relying only on material capacity, Indonesia needs to define its status in international relations. If not, then Indonesia will increasingly fall into the middle power trap, which hinders its steps to becoming a new major relevant power.

Keywords: *Indonesia, GDP, new major relevance power, middle power trap*

Abstrak

Proyeksi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045 menjadi salah satu diskursus yang banyak diperbincangkan, terutama pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Argumen utamanya adalah karena di tahun tersebut Indonesia akan mendapatkan apa yang disebut sebagai demographic dividend. Nyatanya, ditinjau dari kapasitas material ekonomi, sumbangsih Indonesia terhadap perekonomian global berdasarkan GDP misalnya, masih jauh tertinggal dengan major power. Jika hanya mengandalkan pada pertumbuhan GDP, eksposur pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terjadi secara eksponensial. GDP Indonesia di tahun 2023 bahkan setara dengan GDP Italia di tahun 2002. Artinya, Indonesia mesti menunggu lama atau setidaknya 21 tahun hingga 2045 untuk menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Artikel ini mencoba menawarkan gagasan konseptual mengenai upaya yang harus Indonesia tempuh lebih dulu untuk mewujudkan ambisi sebagai kekuatan baru dunia. Alih-alih hanya bersandar pada kapasitas material, Indonesia perlu mendefinisikan statusnya dalam pergaulan internasional. Apabila tidak, maka Indonesia akan semakin terjebak dalam middle power trap yang menghambat langkahnya untuk menjadi new major relevance power.

Kata-kata kunci: *Indonesia, GDP, new major relevance power, middle power trap*

Pendahuluan

Di akhir 2023, ekonomi dunia mengalami peningkatan berdasarkan pendapatan domestik bruto (GDP), berada pada angka \$105 triliun atau mengalami peningkatan sebesar \$5 triliun dibandingkan 2022 atau setara dengan 5,3% (IMF, 2023). Kendati mengalami peningkatan, sebaran GDP global masih terus didominasi oleh beberapa negara yang telah lama menjadi kekuatan mayor ekonomi dunia terutama Amerika Serikat dan China.

Tabel 1. 20 Negara GDP Terbesar Dunia Tahun 2023

Peringkat	Negara	GDP (USD)	% dari Total
1	Amerika Serikayt	26,855	25,54%
2	China	19,374	18,43%
3	Jepang	4,410	4,19%
4	Jerman	4,309	4,10%
5	India	3,737	3,55%
6	Inggris	3,159	3,00%
7	Perancis	2,923	2,78%
8	Italia	2,170	2,06%
9	Kanada	2,090	1,99%
10	Brazil	2,081	1,98%
11	Rusia	2,063	1,96%
12	Korea Selatan	1,722	1,64%
13	Australia	1,708	1,62%
14	Meksiko	1,663	1,58%
15	Spanyol	1,492	1,42%
16	Indonesia	1,392	1,32%
17	Belanda	1,081	1,03%
18	Arab Saudi	1,062	1,01%
19	Turki	1,029	0,98%
20	Swiss	870	0,83%
	Total	93,02	81,01%

Sumber: IMF, 2023

Berdasarkan data pada tabel yang dirilis oleh IMF di atas, gabungan GDP Amerika Serikat dan China menyumbang sebesar 43,97% terhadap GDP global. Gabungan GDP Amerika Serikat dan China tersebut bahkan setara dengan gabungan GDP negara yang menduduki peringkat ketiga hingga ke-20. Secara distribusi pun, praktis gap yang relatif ketat hanya terjadi pada negara selain Amerika Serikat dan China. Negara yang menduduki peringkat ke-21 dan seterusnya hanya berkontribusi sebesar 18,99% terhadap GDP global. Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap 10 negara dengan GDP terbesar

antara tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Rusia yang di tahun sebelumnya berada pada peringkat 8, harus keluar dari peringkat 10 besar dengan menduduki peringkat 11 di tahun 2023. Sementara itu, Brazil berhasil menduduki peringkat 9 dari tahun sebelumnya berada di peringkat 11.

Mundur jauh ke belakang di tahun 2002, peringkat negara-negara dengan GDP 10 besar dunia sekalipun tidak mengalami perubahan signifikan. Secara pertumbuhan China mengalami peningkatan eksponensial sebagai akibat reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan secara fundamental. Selebihnya kekuatan mayor ekonomi tetap mendominasi ekonomi global dan negara-negara kelas bawah terus berkuat dengan sumbangsih minim terhadap GDP global.

Tabel 2. 10 Negara GDP Terbesar Dunia Tahun 2002

Peringkat	Negara	GDP (USD)
1	Amerika Serikat	10,929
2	Zona Eropa	7,200
3	Jepang	4,183
4	Jerman	2,077
5	Inggris	1,789
6	Perancis	1,500
7	China	1,466
8	Italia	1,276
9	Meksiko	772
10	Kanada	760

Sumber: Country Economy, n.d

Selain tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kekuatan mayor ekonomi berdasarkan GDP dalam rentan 2002 hingga 2023 yang telah dipaparkan di atas, persoalan lain adalah terkait dengan disparitas ekonomi global. Negara-negara kekuatan ekonomi lemah dan menengah sulit mengejar ketimpangan terhadap negara mayor ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh mantan *Assistant Director* IMF bidang komunikasi Tim Callen (2019), GDP menjadi penting dalam menentukan status kekuatan ekonomi dunia karena memberikan informasi tentang ukuran ekonomi dan bagaimana kinerja ekonomi suatu negara. Tingkat pertumbuhan GDP riil digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesehatan ekonomi secara umum. Peningkatan GDP riil diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Ketika GDP riil tumbuh, lapangan kerja cenderung meningkat karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Sebaliknya, ketika GDP menyusut, seperti yang terjadi di banyak negara selama krisis ekonomi global, lapangan kerja pun mengalami penurunan. Ringkas kata, GDP merupakan salah satu faktor determinan dalam mendefinisikan kekuatan ekonomi sebuah negara. Meminjam

pandangan dedengkot realisme John Measheimer (1994), kekuatan ekonomi jelas merupakan salah satu variabel materialistis dalam memengaruhi dan menentukan tatanan global.

Perbandingan GDP di atas adalah pengantar dari pembahasan utama yang akan dipaparkan dalam artikel ini, yakni menyangkut kapasitas Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di tahun 2045. Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan GDP Indonesia relatif stabil berada di rata-rata 4,27%. Kendati demikian, sebagaimana data yang dipaparkan di awal tulisan, di tahun 2023 Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan GDP sebesar \$1,392. Selain hanya menyumbang 1,32% terhadap GDP global, GDP tersebut hanya sedikit lebih baik dibandingkan GDP Italia di tahun 2002 dan bahkan masih berada di level kurang dari seribu persen dibandingkan GDP Amerika Serikat di tahun 2023.

Tabel 3. Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia

Tahun	GDP (USD)	GDP Riil (USD)	Perubahan GDP
2022	1.319	1.122	5,31%
2021	1.187	1.066	3,70%
2020	1.059	1.028	-2,07%
2019	1.119	1.049	5,02%
2018	1.042	999	5,17%
2017	1.016	950	5,07%
2016	932	904	5,03%
2015	861	861	4,88%
2014	891	821	5,01%
2013	913	782	5,56%
Average	1.034	958	4,27%

Sumber: Worldometers, n.d

Kesimpulan sederhananya adalah bahwa kontribusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi global di tahun 2023 jika diukur berdasarkan GDP setara dengan kontribusi ekonomi Italia di tahun 2002 dan masih jauh tertinggal jika dibandingkan kontribusi ekonomi negara dominan seperti Amerika Serikat dan China. Jika diproyeksikan dengan pertumbuhan GDP yang stabil sekalipun, di tahun 2028 GDP Indonesia baru akan berada pada angka \$2,093 (Statista, 2023). Angka tersebut sekalipun masih relatif setara dengan GDP Rusia di tahun 2023. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada seberapa stabil pertumbuhan GDP, melainkan seberapa eksponensial pertumbuhan tersebut dapat dilakukan untuk mengejar ketimpangan secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Beranjak dari persoalan di atas, tulisan ini secara normatif mencoba menjelaskan kenapa kemudian Indonesia sulit menjadi *new emerging powers* dalam kontestasi ekonomi global. Argumen utamanya adalah bahwa upaya Indonesia untuk menjadi *major economic power* tidak bisa dijalankan berdasarkan aspek-aspek yang bersifat material, melainkan lebih dulu harus disandarkan pada kekuatan yang bersifat imaterial terutama terkait definisi status dalam pergaulan internasional. Pada praktiknya, Indonesia memang perlu menaruh fokus pada aspek material untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia baru. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia lebih dulu harus mendefinisikan statusnya (*self recognition*) sebagai kekuatan dunia baru.

Artikel ini terdiri dari empat bagian. Pada *bagian pertama*, penulis akan mendiskusikan terkait landasan teoritis yang digunakan dalam tulisan ini. Beranjak pada *bagian kedua*, penulis akan mengelaborasi keterlibatan dan peran Indonesia dalam berbagai forum multilateral. *Bagian ketiga* akan berfokus pada upaya-upaya yang dapat ditempuh Indonesia dalam mengejar status sebagai *major power* dengan melepaskan status *middle power*. Menurut penulis, identifikasi Indonesia sebagai negara yang berstatus *middle power* menjadi salah satu hambatan kenapa Indonesia sulit menyeimbangi *major relevance power*. Dengan demikian, perubahan paradigma dibutuhkan sebagai langkah awal dalam memperkuat pengaruh dalam pergaulan internasional. *Bagian keempat* atau bagian terakhir adalah penutup di mana penulis akan menarik simpulan pembahasan dengan menegaskan kembali argumen utama tulisan ini.

Middle Income Trap; Sebuah Landasan Teoritis Bagaimana Status Memerangkap Negara dalam Tatanan Global

Alih-alih menggunakan landasan teoritis yang tunggal dalam tulisan ini, penulis lebih cenderung untuk berpijak pada beberapa teori hubungan internasional. Hal ini didasarkan pada premis bahwa sejarah tatanan global yang bersifat asimetris sejatinya bukanlah bahasan yang secara eksklusif dibahas oleh salah satu paradigma ataupun teori tertentu. Secara umum, fenomena atau gejala dalam ilmu hubungan internasional dijelaskan dengan menggunakan dua level analisis sebagaimana ditandaskan oleh David Singer (1961). *Pertama*, level analisis sistemis (*systemic level of analysis*) yang menjelaskan hubungan internasional berdasarkan pola interaksi dalam sistem global. Dengan level analisis ini, hubungan internasional sejatinya berfokus pada sistem internasional secara keseluruhan, dengan mengkaji totalitas interaksi dalam sistem dan lingkungan internasional (Singer, 1961:80). Sementara yang *kedua* adalah level analisis tingkat negara (*national state of analysis*) yang berupaya menjelaskan realitas hubungan internasional berdasarkan pengaruh-pengaruh pada level domestik. Level analisis yang kedua ini bersandar pada premis bahwa negara

adalah aktor tunggal dalam menentukan hubungan internasional (*state-centric theories*). Dalam perkembangannya kemudian terdapat level analisis ketiga yakni level analisis tingkat individu yang mencoba menjelaskan hubungan internasional berdasarkan preferensi masyarakat dalam suatu negara. Level analisis ini lahir dari konsepsi liberal tentang politik domestik yang meyakini bahwa negara sebenarnya bukan aktor utama, melainkan hanya sebatas lembaga perwakilan yang disebut sebagai 'sabuk transmisi' bagi preferensi individu dan kelompok sosial Moravcsik (1997: 516-520).

Dalam kaitannya dengan diskursus mengenai status dalam hubungan internasional, maka level analisis yang lebih relevan digunakan adalah level analisis sistemik. Dalam pandangan konstruktivisme misalnya, realitas hubungan internasional haruslah disandarkan pada apa yang disebut sebagai intersubjektivitas. Struktur internasional yang mengatur tindakan negara ditentukan oleh pemaknaan kolektif antar aktor (Wendt, 1992: 398). Sekalipun pemikir konstruktivis meyakini bahwa struktur internasional dibentuk oleh konsepsi tentang diri sendiri yang dikonstruksi secara sosial, nyatanya ia tetap membutuhkan pemaknaan bersama dalam konteks hubungan internasional. Hal inilah yang kemudian dipertegas oleh Ted Hopf (1998:172) yang menyatakan bahwa eksistensi aktor dan struktur ditentukan oleh sikap saling percaya, *mutually constitute*. Kendati demikian, perlu digaris bawahi bahwa konstruktivisme sejatinya menempatkan identitas (*self identity*) sebagai variabel independen. Oleh sebab itu, status dalam pergaulan internasional tidak memerlukan rekognisi luar melainkan lebih menekankan pada rekognisi secara mandiri (*self recognition*) (Rosyidin, 2017:4). Dengan demikian, apa yang dimaksud sebagai intersubjektivitas dan pemaknaan bersama (*mutually constitute*) dalam perspektif konstruktivisme relevan digunakan hanya untuk menjelaskan interaksi yang terbangun antar aktor yang memberi makna satu sama lain, entah itu konfliktual atau kooperatif (Wendt, 1992: 399). Akan bersifat kooperatif apabila pemaknaan yang diberikan sama-sama bersifat positif, ataupun sebaliknya. Lepas dari itu, sejatinya negara berkapasitas untuk menentukan statusnya sendiri berdasarkan sejarah, budaya, geografi, dan kepemimpinan (Larson & Shevcenko dalam Rosyidin, 2017:5). Dengan demikian, konstruktivisme sebetulnya mengakui keberadaan struktur internasional, namun tidak menafikan faktor-faktor internal yang berpengaruh pada struktur internasional itu sendiri.

Dalam konteks hubungan antar negara yang bersifat asimetris, maka proses intersubjektivitas dan pemaknaan bersama dapat ditarik misalnya melalui pemaknaan negara-negara maju (*global north*) dan negara-negara berkembang (*global south*). Proses konstruksi identitas sebagai negara kuat yang coba dilakukan Indonesia secara lebih konkret misalnya, masih terbentur oleh

pemaknaan luar terhadap Indonesia itu sendiri. World Bank hingga hari ini masih memahami Indonesia sebagai *upper-middle-income country*, alih-alih *high income country* (World bank, 2023). Dengan status sebagai *upper-middle-income country*, maka Indonesia berpotensi tidak lagi mendapatkan hibah dari negara maju dan pinjaman dengan bunga yang relatif lebih rendah (Tempo, 2023). Sementara di lain sisi, status tersebut tidak serta merta menempatkan Indonesia pada jajaran kekuatan ekonomi dunia. Dengan demikian, maka status ataupun pelabelan terhadap suatu negara memberi arti signifikan dalam konstelasi global. Sampai pada titik ini, seharusnya Indonesia melakukan pengabaian terhadap rekognisi luar dikarenakan rekognisi tersebut hanya akan membatasi pergerakan Indonesia dalam konstelasi global yang lebih luas. Dengan kata lain, status dalam pergaulan internasional dapat memerangkap suatu negara untuk hanya melakukan sesuatu tertentu saja, tanpa dapat melakukan upaya lain. Oleh karena itu, status menjadi penting karena merupakan penggerak peran (*the role of driven*) dalam pergaulan internasional.

Berbicara mengenai tatanan global yang bersifat asimetris tidak menjadi sebuah bahasan lengkap tanpa memasukkan teori ketergantungan di dalamnya. Teori ketergantungan sebagai turunan dari teori Marxisme boleh jadi adalah yang paling relevan dalam menjelaskan interdependensi yang sifatnya asimetris. Sebagai teori yang terkategori menggunakan level analisis struktural, teori ketergantungan meyakini bahwa negara-negara berkembang terperangkap di dalam struktur kapitalisme global yang hierarkis dan tidak adil (Dougherty & Platzgraff dalam Rosyidin, 2022:75). Dengan demikian, negara-negara berkembang harus berjuang keras untuk dapat lepas dari struktur hierarkis yang tidak adil tersebut. Salah satu teori yang menawarkan kerangka konseptual untuk lepas dari jerat tersebut adalah teori kritis yang meyakini bahwa perubahan terhadap struktur internasional dapat dilakukan melalui perlawanan terhadap hegemonik. Bagi teori kritis, hubungan internasional merupakan realitas hierarkis yang bias, tidak adil, diskriminatif, dan eksploitatif di mana terdapat hegemoni gagasan yang berupaya mengooptasi golongan marginal terhadap kekuatan tertentu (Rosyidin, 2022:137). Kooptasi dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional untuk melegitimasi tindakan kooptasi sebagaimana dimaksud.

Dalam konteks hubungan antar negara, kita dapat mencermati bagaimana kooptasi negara-negara maju diselundupkan melalui agenda Paris Agreement. Perjanjian ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan rencana nasional, yang dikenal sebagai National Determined Contribution (NDC), yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement, Indonesia kemudian berkewajiban untuk

mengurangi emisi dari tahun 2020-2030 sebesar 29% (tanpa syarat) hingga 41% (bersyarat) dari skenario *business as usual* tahun 2030. Komitmen ini merupakan perwujudan dari National Determined Contribution (NDC) yang secara formal disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi yang berjudul *Enhanced Nationally Determined Contribution* di tahun 2022. Akibatnya Indonesia ditekan untuk melakukan transisi energi sesegera mungkin. Percepatan transisi energi yang menjadi prioritas pemerintah kemudian disusul dengan program hilirisasi (*downstreaming*) nikel. Ambisi transisi energi pemerintah dan gembargembor energi hijau nyatanya bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Climate Rights International (CRI) menemukan dugaan adanya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan oleh industri nikel di Halmahera. Setidaknya terdapat 5.331 hektare hutan tropis yang ditebang di dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera yang menyebabkan hilangnya sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon (Tempo, 2024). Hal ini mengafirmasi apa yang disebut oleh Robert Cox, bahwa hegemoni adalah kombinasi dari paksaan dan persetujuan dari pihak yang mendominasi dan didominasi (Rosyidin, 2022:141).

Beranjak dari kerangka teoritis di atas, maka pembahasan mengenai *middle income trap* harusnya didudukkan dalam analisis yang sistemik. *Middle income trap* menengah mengacu pada situasi ketika negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat dan mencapai status pendapatan menengah, namun kesulitan untuk beralih menuju ekonomi berpendapatan tinggi (World Bank dalam F. Runde Daniel et al., 2017). Negara berpendapatan menengah dihadapkan pada situasi di mana mereka bertarung dengan negara berpenghasilan rendah dalam menyediakan tenaga kerja murah, dan di satu sisi juga dihadapkan pada pertarungan dengan negara maju dalam konteks teknologi dan inovasi. Kondisi ini bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional, melainkan fenomena yang telah ada sejak 1950an berdasarkan laporan dari World Bank sebagaimana dimuat oleh F. Runde Daniel et al., (2017). Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kekuatan mayor ekonomi berdasarkan GDP dalam rentan 2002 hingga 2023 sebagaimana data yang telah dipaparkan di awal tulisan.

Praktis hanya China yang dapat mendobrak tembok tebal *middle income trap*. GDP China 2014 berada pada angka \$13,000, angka yang sama dengan Jepang di tahun 1986. Kondisi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan GDP tahun 2023. Kemunculan China sebagai satu-satunya yang mampu mendobrak *middle income trap* tidak mungkin dijelaskan hanya dengan kerangka analisis tingkat negara. Kemajuan China sejatinya didasarkan pada gugatan terhadap kekuatan hegemonik. Kemajuan tersebut didasarkan pada kebangkitan secara damai alias '*peaceful rise*', yakni upaya China untuk menjadikan dirinya kekuatan

besar tanpa melakukan konfrontasi terhadap kekuatan yang telah ada (Bijian, 2013). Apa yang dilakukan oleh China salah satunya dapat dijelaskan menggunakan teori identitas sosial, di mana suatu negara mengidentifikasi status dalam interaksi dengan negara lain untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam pergaulan internasional (Larson & Shevchenko, 2010:67). Teori identitas sosial menekankan bahwa kekuatan yang sedang bangkit seperti China lebih merujuk pada upaya mempertahankan identitas khas, alih-alih mengadopsi sepenuhnya norma-norma Barat, yang berdampak pada keterlibatan mereka dalam tata kelola global Larson & Shevchenko, 2010:94). Dengan mengambil posisi ini, maka China dapat menentukan langkah dan perannya sendiri dalam memengaruhi tatanan global.

Memahami Peran Indonesia dalam Berbagai Forum Multilateral

Eksistensi Indonesia dalam forum internasional dapat dilacak melalui keterlibatannya dalam banyak kerja sama multilateral. Alih-alih terlibat dalam kerja sama yang seragam, Indonesia cenderung mengambil posisi yang beragam dalam konteks multilateralisme. Kecenderungan ini, selain merefleksikan karakteristik dan lanskap hubungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin, dipahami juga sebagai amplifikasi keterlibatan kekuatan negara kelas menengah. Dalam konteks geopolitik, Indonesia terlibat dalam beberapa perjanjian multilateral kawasan Pasifik. TPP dan RCEP misalnya, dua poros diametral dominasi Amerika Serikat dan Tiongkok di Pasifik. Tak sampai di situ, Indonesia merespons keterlibatannya melalui keketuaan di ASEAN, G20, dan MIKTA pada periode 2022 – 2023, setelah sebelumnya berhasil melaksanakan Presidensi Dewan Keamanan PBB. Mundur sedikit ke belakang, Indonesia menggagas Indonesia-Africa Forum pada Tahun 2018 yang menjadi tolok kunjungan Presiden Joko Widodo ke empat negara Afrika di Tahun 2023. Di kawasan ASEAN, resonansi sejenis tercermin dalam dua gagasan kebijakan luar negeri, yaitu *dynamic equilibrium* dan *ASEAN outlook on the Indo-Pacific*.

Indonesia melaksanakan aktivisme politik luar negeri dengan bersandar pada prinsip bebas aktif (*free active principal*). Tak hanya sebatas doktrin yang bersifat retorik, prinsip tersebut dituangkan secara tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional dengan menganut prinsip bebas aktif. Dalam pelaksanaannya, prinsip politik luar negeri bebas aktif berlaku relatif sesuai dengan konteks kepemimpinan yang berlangsung. Sebagai contoh, di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam doktrin '*zero enemy million friends*'. Melalui pidato yang ia sampaikan pada 20 Oktober 2009 ketika dilantik sebagai presiden, SBY dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia mengusung semangat internasionalisme

yang dinamis yang menekankan pada semangat persahabatan terhadap semua. Berlandas pada gagasan tersebut, Indonesia menjalankan apa yang disebut dengan “*all direction foreign policy*” (Kompas, 2009).

Berbeda dengan semangat politik luar negeri pemerintahan SBY yang cenderung mengarah pada idealistis, terjemahan prinsip bebas aktif di era Presiden Jokowi lebih mengarah pada pragmatisme. Jokowi lebih menekankan pada pencapaian manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM. Fachrir kala itu, kendati politik luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi tetap bebas aktif, namun prinsip tersebut tidak boleh merugikan kepentingan nasional (Setkab, 2015). Meskipun memiliki perbedaan ketika ditarik ke dalam ranah praktis, politik luar negeri bebas aktif di era SBY dan Jokowi sama-sama menekankan pada pentingnya upaya melakukan depolarisasi.

Di tengah kondisi dunia yang sedang bergejolak sebagaimana dikiaskan dengan istilah *navigating a turbulent ocean* oleh SBY, Indonesia memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan dinamis merujuk pada kondisi di mana ketiadaan kekuatan dominan yang bersifat tunggal, akan menciptakan stabilitas internasional di tengah kondisi yang bergejolak. Konsepsi tersebut diperkenalkan oleh Marty Natalegawa sehingga sering juga disebut dengan Doktrin Natalegawa. Bergeser ke Era Jokowi, semakin meruncingnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China akibat perang dagang yang terus terjadi, mendorong Indonesia untuk mempromosikan gagasan yang disebut dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Walaupun mengalami pergeseran pemahaman dan memiliki pendekatan yang berbeda, pemerintahan SBY dan Jokowi sepaham dalam melihat posisi Indonesia yang berada dalam arus rivalitas kawasan di tengah dominansi pengaruh Amerika Serikat dan kebangkitan China sebagai kekuatan baru (*the new rising power*). Alhasil, dalam konteks kerja sama multilateral, baik di era pemerintahan SBY maupun era pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki kecenderungan pada multilateralisme yang beragam untuk menghindari terjadinya polaritas.

Yose Rizal Damuri et al., (2023) melalui tulisan mereka yang berjudul *Strategic Interests, Regional Integration and International Economic Policy in Indonesia* mencoba menjelaskan motif keterlibatan aktif Indonesia dalam regionalisme dan internasionalisme ekonomi. Damuri et al., berpijak pada fondasi *middle powers* dalam menjelaskan upaya Indonesia dalam melakukan perimbangan kekuatan (Damuri et al., 2023: 119). Namun, dalam sub penjelasan kerangka konseptual Damuri et al., justru melompat dari pijakan tersebut dan beralih menggunakan konsep kemerdekaan dan kedaulatan untuk menjelaskan kebijakan ekonomi Indonesia. Bagi Damuri et al., kemerdekaan dan kedaulatan merupakan salah satu dari dua faktor kepentingan nasional yang cukup memengaruhi kebijakan

ekonomi Indonesia (Damuri et al., 2023: 119). Faktor keduanya adalah stabilitas regional dengan berargumen bahwa stabilitas regional merupakan faktor kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari perspektif eksternal.

Damuri et al., tampak keliru dalam memilih pendekatan. Keterlibatan aktif dalam forum multilateral tidak mungkin dijelaskan secara relevan dengan menggunakan konsep kedaulatan. Hal ini disebabkan karena keduanya merupakan konsep yang bertentangan secara teoritis. Multilateralisme dalam konteks kerja sama merupakan turunan dari pendekatan liberal/neoliberal/liberal institusional, sementara kedaulatan datang sebagai variabel pendekatan realis/neorealis. Robert Keohane seorang liberal institusionalis melalui tulisannya yang sangat berpengaruh pasca berakhirnya Perang Dingin *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (1984), berargumen bahwa ketidakpastian dalam hubungan internasional dapat diatasi melalui interdependensi ekonomi. Argumen ini merupakan respons terhadap makin kompleksnya hubungan internasional akibat fenomena transnasionalisme. Interdependensi sebagaimana dijelaskan oleh Keohane sebetulnya turunan dari premis liberalis yang berargumen bahwa ketidakpastian hubungan internasional sebagai akibat kondisi anarki, dapat diantisipasi dengan menciptakan kerja sama ekonomi melalui organisasi internasional atau rezim internasional. Di lain sisi, konsep kedaulatan lebih condong pada pendekatan realis. Kedaulatan merupakan keniscayaan karena negara adalah satu-satunya aktor yang berdaulat dalam hubungan internasional. Sehingga dengan demikian, realis memandang struktur internasional sebagai sesuatu yang bersifat anarki alias *'no government over government'*. Menurut Kenneth Waltz (dalam Lake, 2003: 305-306), peran negara-negara besar yang menjadi aktor dominan dalam politik internasional adalah faktor penentu dalam kerja sama internasional. Berkaca dari penjelasan mengenai konsep kerja sama multilateral dengan konsep kedaulatan ini, tulisan Damuri et al., dalam menjelaskan motif keterlibatan aktif Indonesia dalam multilateralisme menjadi tidak terjawab dengan relevan. Argumen Damuri et al., akan cukup relevan andai saja konsisten menggunakan pendekatan liberal institusionalisme, karena dalam penjelasannya mereka menggunakan data-data ekonomi sebagai eviden untuk memperkuat argumen. Ringkasnya, interdependensi tidak mungkin bisa dielakkan bahkan menjadi kebutuhan utama Indonesia dalam mengejar status sebagai *major power*.

Bertalian dengan hal tersebut, terdapat satu tulisan dari Dinar Elly Ardianti et al., (2023) yang mengulas gagasan *dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* menggunakan pendekatan liberal institusionalisme. Tulisan tersebut tampaknya lebih relevan dalam menjelaskan kenapa Indonesia cenderung melibatkan diri dalam banyak forum multilateral. Mereka

berkesimpulan bahwa *dynamic equilibrium* hanya bisa dipahami sebatas sebuah doktrin sementara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* merupakan kerangka kerja sama konkrit yang dihasilkan dari negosiasi panjang antar anggota (Ardianti et al., 2023: 17). Kendati memiliki perbedaan, keduanya sama-sama merefleksikan upaya ASEAN dalam menyeimbangkan *major relevance power*. Hanya saja tulisan mereka terbatas dalam menekankan motif Indonesia dengan gagasan *dynamic equilibrium* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dalam memengaruhi *major relevance power* melalui ASEAN. Tulisan tersebut mengkaji keduanya secara komparatif, alih-alih memberikan ruang lebih luas untuk mengkaji keduanya dalam konteks *middle power*. Tulisan tersebut menggunakan pendekatan liberal institusionalis yang memiliki keterbatasan dalam menjelaskan pengaruh negara hegemon dalam memastikan keberlangsungan sebuah kerja sama multilateral. Kontrasnya terlihat dalam pertanyaan, apakah betul Indonesia melalui ASEAN mencoba menyeimbangkan kekuatan besar yang ada? Atau sebaliknya, keberadaan kekuatan besar justru dibutuhkan dalam memastikan keberlanjutan ASEAN?

Beranjak dari penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Indonesia untuk melibatkan diri dalam banyak forum multilateral semata untuk menghindari terjadinya polaritas dari *major relevance power*, alih-alih mengambil peran lebih di dalamnya. Kecenderungan penyeimbangan demikian dapat dipahami karena adanya keterbatasan kekuatan dalam mengonfrontasi kekuatan utama secara langsung atau untuk secara terbuka menyuarakan kepentingan nasional secara eksplisit dalam forum-forum internasional. Sehingga, alih-alih memainkan peran secara lebih dominan, negara kekuatan menengah seperti Indonesia cenderung mengambil posisi sebagai *bridger* kepentingan dalam hubungan internasional.

Merumuskan Ulang Wacana Kemajuan Indonesia

Awidya Santikajaya (2017) dalam tulisannya yang berjudul *Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise* menawarkan kerangka teoritis untuk memahami kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan baru global. Argumen utamanya adalah pengabaian Indonesia sebagai *new emerging powers* baik dalam perbincangan akademik maupun pembahasan praktis ditengarai oleh kapasitas material Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota BRIC (Brazil, Rusia, Indonesia, China). Meskipun beberapa laporan ekonomi telah mengakui potensi ekonomi Indonesia, namun masih minim literatur yang membahas mengenai kebangkitan Indonesia dalam lanskap politik global (Awidya, 2016: 565). Lebih lanjut Awidya menjelaskan bagaimana konsep kekuatan menengah tidak banyak membantu menguatkan posisi Indonesia dalam forum global kendati terdapat aktivisme peran dalam

berbagai forum multilateral. Hal ini disebabkan oleh sikap Indonesia yang masih menyandarkan kemajuan pada kapasitas material (Awidya, 2016: 566). Menurutnya konsep kekuatan menengah yang disematkan pada Indonesia tidak kompatibel dengan status *middle powers* negara-negara lain seperti Australia, Kanada, dan Jepang yang lebih *fit* dan *proper* dengan tatanan liberal Barat.

Wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dengan bersandar pada faktor material dapat dicermati dalam pidato tahunan yang disampaikan oleh Joko Widodo pada 16 Agustus 2023, "*ini yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi lima negara besar kekuatan ekonomi dunia*" (Kementerian Setneg, 2023). Faktor material memang penting namun bukanlah faktor determinan satu-satunya dalam menentukan kapasitas kekuatan suatu negara, apalagi untuk konteks Indonesia yang masih terjebak dalam *middle income trap*. Kekuatan menengah seperti Indonesia berkaitan dengan posisi mereka dalam sistem internasional yang terbentuk melalui proses interdependensi. Dalam konteks interdependensi tersebut yang selayaknya menjadi faktor penentu adalah posisi negara dalam jejaring internasional bukan pada kapasitas materialnya. Kalau ditimbang semata berdasarkan faktor material, forum multilateral G20 misalnya, menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam hal GDP. Bahkan ketika GDP 15 negara anggota terbawah digabungkan, jumlahnya tidak cukup besar untuk menyamai GDP Amerika Serikat dan China (Trading Economics, 2023). Singkat kata, Indonesia akan kesulitan menembus status sebagai *new emerging powers* jika semata bertarung dengan hanya bersandar pada kapasitas material. Hal pertama yang perlu dilakukan Indonesia adalah mengidentifikasi identitasnya sendiri sehingga ia dapat memberikan peran signifikan dalam pergaulan internasional.

Berdasarkan hambatan material di atas, Indonesia selayaknya menekankan pada kapasitas imaterialnya. Posisi Indonesia yang lebih mengedepankan peran sebagai penghubung (*bridge builder*) antara kepentingan regional dan global sebagai sesuatu bertentangan dengan apa yang dilakukan negara-negara BRIC yang enggan berpartisipasi dalam regionalisme (Awidya, 2016: 569). Argumen tersebut dapat penulis terima karena kebangkitan negara-negara BRIC cenderung lebih merefleksikan pendekatan realisme ofensif milik John Mearsheimer (1994) yang menekankan tentang pentingnya faktor material seperti populasi, geografi, dan sumber daya alam, sehingga memiliki kapasitas dalam mempengaruhi tatanan dunia. Di sisi yang lain menjelaskan kebangkitan Indonesia merupakan refleksi pendekatan konstruktivis yang ditawarkan oleh Amitav Acharya (2014) bahwa kebangkitan Indonesia cenderung didorong oleh kemampuannya dalam menyeimbangkan tiga faktor yang meliputi demokrasi, pembangunan, dan stabilitas. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia lebih berperan

sebagai aktor normatif ketimbang menjadikan kekuatan militer dan ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, sebagaimana premis teori identitas sosial, wacana kemajuan Indonesia harusnya didesain dalam rangka mempertahankan identitas khas, alih-alih mengadopsi sepenuhnya norma-norma Barat.

Pendapat Awdidya di atas senada dengan yang disampaikan oleh Mohamad Rosyidin (2017) dalam tulisan *Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major status in the Asian Century*. Argumen utama yang ia sampaikan dalam tulisannya adalah bahwa apabila hendak masuk dalam 'Third Asian Giant' bersama China dan India, maka yang pertama Indonesia harus lakukan ialah dengan melakukan redefinisi peran dalam pergaulan internasional. Rosyidin berpendapat bahwa di bawah Pemerintahan Jokowi kepentingan nasional didefinisikan sebatas kepentingan dasar ekonomi material sehingga cenderung menafikan pentingnya status dalam pergaulan internasional. Status dalam hubungan internasional sangat penting karena ia memengaruhi bagaimana peran negara di panggung global, mencakup peran dan pengakuan suatu negara dalam hierarki internasional (Rosyidin, 2017:6).

Beranjak dari uraian di atas, penulis mengafirmasi premis bahwa Indonesia akan kesulitan mendapatkan *absolute gain* dalam rangka mengejar status sebagai *major power* jika semata bersandar pada kapasitas material. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian Indonesia dapat memanfaatkan keterlibatan aktifnya dalam forum internasional untuk mengejar status *major power*? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis berpandangan bahwa Indonesia setidaknya perlu melakukan tiga hal. *Pertama*, dibutuhkan pencitraan ulang terhadap status sebagai 'bridger' menjadi aktor dengan peran 'decider' dalam pergaulan internasional. Untuk menjadi *major power*, maka Indonesia tidak bisa selamanya mendefinisikan diri dan menerima rekognisi negara luar sebagai negara kekuatan menengah. Pembiaran terhadap status ini telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam *middle income country* selama 29 tahun sebagaimana disampaikan oleh Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Suharso Monoarfa pada 2022 (CNBC Indonesia, 2022).

Kedua, Indonesia harus mampu melepaskan (*detach*) ketergantungan terhadap *major power* dengan melakukan perimbangan kekuatan dalam forum internasional. Sejarah keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral praktis merefleksikan konsep kekuatan menengah, yakni kekuatan yang merujuk pada karakter kebijakan luar negeri negara-negara yang berada dalam kelompok kekuatan kelas menengah (*middle power*) yang posisinya diapit oleh kekuatan besar (*powerfull country*) dan kekuatan kecil (*not-so powerfull country*) (Lee et al., 2015: 4). Akibatnya Indonesia praktis mengambil peran pengekor dalam

berbagai forum internasional. Baru-baru ini, Indonesia telah menyelesaikan *initial memorandum* untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Narasi, 2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengharmonisasikan beberapa regulasi domestik dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD. Keanggotaan OECD dinilai signifikan bagi Indonesia karena memberikan akses jaringan terhadap negara-negara maju. Kendati demikian, apabila tidak mampu melepaskan ketergantungan terhadap standar dan norma barat, maka Indonesia hanya akan menjadi penyeimbang bagi kekuatan dunia. Betul bahwa kemajuan China salah satunya disebabkan oleh keputusan untuk masuk ke dalam pasar internasional secara dalam. Namun keputusan China tersebut didahului oleh upaya untuk mempertahankan identitas yang khas daripada sepenuhnya mengadopsi norma-norma Barat. Dengan demikian China dapat menentukan arahnya sendiri dalam mewujudkan status *major power*.

Ketiga, Indonesia perlu melakukan pergeseran (*remapping*) terhadap keterlibatan dalam forum multilateral dari yang sebelumnya cenderung *balancing* terhadap *major power* menjadi negara dengan peran sebagai pengarah (*navigator*) terhadap *lower power*. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan diversifikasi pasar hingga memasuk pasokan komoditas vital terhadap negara-negara *lower power* terutama terhadap kawasan Afrika yang memainkan peran penting dalam perekonomian global hari ini. Hal ini sangat memungkinkan mengingat Indonesia menyandang status sebagai pengikat solidaritas bagi *global south* sejak lama. Dengan demikian, forum seperti Indonesia-Africa Forum yang terakhir dilaksanakan di Bali pada 2024, harus dimanfaatkan secara konsisten oleh Indonesia untuk memperkuat perannya terhadap *lower power* secara praktis, dan terhadap *global south* dalam konteks normatif. Semangat Bandung untuk Agenda 2063 Afrika merefleksikan kekuatan historis bagi Indonesia untuk menjadi pemain penting bagi *global south* (Sarwindaningrum & Widi, 2024). Alih-alih menjadi pengekor terhadap *global north*, Indonesia berpeluang menjadi navigator bagi *global south*. Pertanyaannya, bagaimana bisa Indonesia dengan keterbatasan kekuatan yang dimiliki mampu memainkan peran sebagai *decider* dalam forum internasional?

Dari Penyeimbang Menjadi Penentu: Langkah Awal Menjadi *Major Power*

Berdasarkan penjabaran di atas dan kerangka konseptual yang ditawarkan pada subbab sebelumnya, Indonesia cenderung menerima rekognisi sebagai *middle power*. Alih-alih terlibat dalam kerja sama yang seragam, Indonesia cenderung mengambil posisi yang beragam dalam konteks multilateralisme. Kecenderungan ini dapat dipahami sebagai amplifikasi keterlibatan kekuatan

kelas menengah, karakter khas *middle power*. Kendati demikian, alih-alih berhasil menjadi fasilitator dalam banyak kerja sama internasional seperti melalui keketuaan di ASEAN, G20, dan MIKTA pada periode 2022 – 2023, Indonesia mestinya dapat mengambil peran yang jauh lebih signifikan dalam forum internasional tersebut. Untuk menjadi *major power*, Indonesia perlu mengubah peran dari hanya sebatas fasilitator menjadi negara dengan peran sebagai penentu. Tradisi menjadi penentu sebetulnya pernah ada di Indonesia. Ketika Orde Lama misalnya, Soekarno memperkenalkan konsep Oldefos (*Old Established Forces*), dan Nefos (*New Established Forces*) untuk menggugat kekuatan negara kolonial pasca merdekanya negara-negara di Asia dan Afrika selepas berakhirnya Perang Dunia Dua. Indonesia kemudian berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang menegaskan posisinya sebagai pemimpin Asia-Afrika. Selain itu, di era Orde Baru Indonesia berhasil dijuluki sebagai *Asian Tiger* atas keberhasilan dalam melakukan pembangunan ekonomi dan menjadi pemimpin kawasan dengan menginisiasi berdirinya ASEAN. Apa yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto tampaknya belum mampu diulang oleh suksesor pasca reformasi.

Pada 15 November 2020, seluruh negara ASEAN beserta lima negara mitra (China, Korea Selatan, Selandia Baru, Jepang, dan Australia) sepakat untuk menandatangani pakta perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Meski baru disepakati di tahun 2020, pembentukan RCEP sebetulnya digagas oleh Indonesia pada 2011 ketika melaksanakan keketuaan ASEAN. Kendati muncul desakan terhadap *Free Trade Agreement* yang dipimpin oleh China, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan RCEP sebagai inisiatif bersama ASEAN. RCEP sendiri merupakan respons atas pembentukan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di tahun 2010 oleh Amerika Serikat. Merepresentasikan 40% dari total GDP dunia, Indonesia meyakini bahwa TPP akan semakin menguatkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik (US Embassy & Conulates in Indonesia, 2013).

Walaupun tidak terlibat secara resmi dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP), faktanya Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan tujuh dari 12 anggota TPP. Ketujuh negara ini menyumbang lebih dari 75 persen dari total ekspor Indonesia (Kumar, 2016). Selain itu, seluruh negara TPP sudah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga negara-negara TPP yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia (seperti AS dan Kanada) sekalipun tidak dapat menaikkan tarif rata-rata yang terikat pada ekspor. Artinya Indonesia tetap diuntungkan dari aspek ekonomi tanpa harus bergabung secara resmi dengan TPP. Proses dekonstruksi kekuatan di antara RCEP dan TPP merujuk pada pandangan konstruktivis yang percaya bahwa selama aktor dan struktur saling membentuk satu sama lain dan

kepentingan negara merupakan bagian dari proses konstruksi identitas, maka perubahan dalam politik dunia dimungkinkan untuk terjadi (Hopf, 1998: 181).

Setidaknya ada tiga hal yang perlu Indonesia tempuh untuk menegaskan signifikansinya dalam forum internasional. *Pertama*, Indonesia perlu melakukan pencitraan ulang terhadap status sebagai *'bridger'* menjadi aktor dengan peran *'decider'* dalam forum internasional. Dalam konteks geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian multilateral kawasan Pasifik seperti TPP dan RCEP misalnya dipahami hanya sebatas penyeimbang terhadap dua poros diametral dominasi pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok di Pasifik. Melalui keterlibatannya dalam TPP dan RCEP, Indonesia praktis hanya berperan dalam meregangkan ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik alih-alih ikut terlibat dalam konfrontasi. Alhasil, Indonesia hanya diakui statusnya sebagai mediator dalam hubungan internasional. Pencapaian status dan pengakuan menjadi penting dalam pergaulan global mengingat apa yang disebut Hopf (1998) sebagai *mutually constitute*, bahwa tindakan suatu aktor hanya akan memiliki makna apabila terjadi dalam konteks intersubjektif (Hopf, 1998: 172-173). Dalam posisi tersebut, Indonesia seharusnya tidak terjebak dalam arus konflik Amerika Serikat-China melainkan mengambil peran yang lebih determinan. Indonesia dapat memunculkan alternatif kerja sama lain bersama negara lain untuk dijadikan sebagai alat penekan terhadap Amerika Serikat dan China. Pada September 2023 Presiden Jokowi memimpin pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang diselenggarakan di India. Sebagaimana diketahui seluruh anggota MIKTA merupakan anggota G20, namun tidak tergabung dalam G7 dan BRICS. Berdasarkan GDP, negara-negara anggota MIKTA berada dalam urutan 12 hingga 19 ekonomi terbesar dunia (IMF dalam MIKTA, 2020: 5). Forum sebagaimana MIKTA tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai alat penekan terhadap kekuatan dominan yang ada. Sayangnya, forum kekuatan menengah seperti MIKTA cenderung hanya dijadikan *gimmick* dalam forum internasional tanpa ada tindak lanjut konkret.

Selain terlibat secara langsung dalam kerja sama kawasan RCEP dan keterlibatan tidak langsung dalam TPP, Indonesia telah lebih dulu terlibat dalam Perkumpulan G20, forum kerja sama multilateral yang menguasai 80% sebaran perdagangan dunia berdasarkan GDP (World Economics, n.d). Menariknya Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam forum multilateral tersebut dan berhasil menyelenggarakan Presidensi G20 pada Tahun 2022. Menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam G20, Indonesia mencoba melakukan konsolidasi dan mempromosikan kepentingan ASEAN kepada G20. Di era pemerintahan SBY misalnya, Indonesia membentuk *The ASEAN G20 Contact Group* guna mengoordinasikan posisi ASEAN di dalam

forum G20. Sama halnya dengan TPP dan RCEP, peran Indonesia di dalam G20 hanya terbatas pada mediator kepentingan kawasan dengan agenda global. Padahal Indonesia seharusnya mampu menegaskan diri sebagai pemimpin kawasan. Dengan demikian Indonesia mestinya bertindak lebih dari sekedar promotor ASEAN melainkan sebagai aktor penentu dalam kerja sama internasional yang berhubungan dengan kepentingan kawasan.

Kedua, Indonesia perlu melepaskan (*detach*) diri dari ketergantungan terhadap *major power*. Kecenderungan untuk bergantung pada *major power* telah berlangsung terutama pasca reformasi hingga periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Indonesia berhasil melaksanakan Presidensi G20 Tahun 2022 yang langsung disambut dengan keketuaan ASEAN 2023 dan berhasil melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Terdapat 11 negara di luar ASEAN yang diundang dalam pelaksanaan KTT ASEAN 2023. Dari ke-11 negara tersebut, lagi dan lagi kehadiran Amerika Serikat dan China mendapat perhatian khusus. China diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang sementara Amerika Serikat diwakili oleh Wakil Presiden Kamala Harris yang menegaskan kembali komitmen abadi Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara dan sentralitas ASEAN. Hal ini tidak mengherankan mengingat China dan Amerika Serikat memegang setir kemudi terhadap perekonomian Indonesia. Di tahun 2021 Amerika Serikat dan China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dihitung dari agregat ekspor dan impor dengan *partner share* masing-masing sebesar 23.23% dan 11.15% (WITS, 2021). Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap investasi China makin meningkat di periode kedua pemerintahan Jokowi dengan nilai investasi sebesar \$8,2 miliar di tahun 2022, tertinggi kedua setelah Singapura (Asean Briefing, 2023). Ketergantungan terhadap China makin kentara dengan dijadikannya China sebagai investor tunggal dalam proyek Kereta Cepat Indonesia China yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Ketergantungan ekonomi demikian akan menyusahkan Indonesia untuk keluar dari pengaruh *major power*. Kendati membutuhkan kerja sama dengan *major power*, Indonesia setidaknya perlu untuk melakukan pemerataan aktivitas ekonomi dengan negara lain. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengurangi dependensi dengan *major power*.

Terakhir, atau yang *ketiga*, Indonesia harus segera melakukan *remapping* dari yang sebelumnya cenderung *balancing* terhadap *major power*, menjadi negara dengan peran sebagai pengarah (*navigator*) terhadap *lower power*. Pada 20 Agustus 2023 Presiden Jokowi mengunjungi Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan setelah sebelumnya menggagas *Indonesia-Africa Forum* pada Tahun 2018. Dalam keterangan pers menjelang keberangkatan disampaikan bahwa lawatan Jokowi ke Afrika mengusung kembali Spirit Bandung untuk meneguhkan eksistensi negara-negara *Global South* (Sinaga, 2023). Spirit

Bandung mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bagian dari Afrika dan sebaliknya. Dalam konteks ekonomi, semangat tersebut dapat diartikulasikan ke dalam peluang investasi luar negeri Indonesia. Kalau dengan *major power* Indonesia cenderung menjadi objek investasi, maka Indonesia seharusnya mampu menjadi investor terhadap *lower power*. Dengan demikian, Indonesia tidak saja menjadi investor bagi *lower power*, namun juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap *major power*.

Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan dari penjabaran di atas, bahwa keterlibatan Indonesia dalam beragam forum multilateral didorong oleh semangat Indonesia untuk membawa semangat kekuatan menengah dalam forum global. Hanya saja semangat tersebut hanya merefleksikan posisi Indonesia sebagai mediator/*bridger* kepentingan *major power*. Kecenderungan Indonesia yang hanya menjadi fasilitator ditengarai oleh pilihan Indonesia yang cenderung enggan melepaskan diri status *middle power*. Padahal pemaknaan dan pemahaman terhadap identitas merupakan langkah awal untuk menyandang status sebagai *major relevance power*. Tak ayal apabila Indonesia terperangkap dalam *middle income country* selama 29 tahun yang ditengarai oleh kegagalan dalam mendefinisikan peran secara jelas dalam pergaulan internasional.

Interdependensi ekonomi hanyalah alat, namun signifikansi peran dalam multilateralisme harus didahului dengan identifikasi peran dalam pergaulan internasional. Pada akhirnya, penulis ingin menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia untuk menjadi *major relevance power* global tidak semata-mata didasarkan pada kapasitas ekonomi atau material, namun didasarkan pemaknaan akan identitas. Untuk itu, yang pertama kali harus Indonesia lakukan adalah mencitrakan ulang status sebagai '*bridger*' menjadi aktor dengan peran '*decider*'. *Kedua*, Indonesia perlu melakukan pemerataan aktivitas ekonomi guna melepaskan (*detach*) ketergantungan terhadap *major power*. *Ketiga*, perlu dilakukan pergeseran (*remapping*) dari yang sebelumnya cenderung *balancing* terhadap *major power* menjadi negara dengan peran sebagai pengarah (*navigator*) terhadap *lower power*.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2014). *Indonesia matters: Asia's emerging democratic power*. World Scientific Publishing Co. <https://doi.org/10.1142/9298>.
- Ardianti, D. E., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2023). Di Bawah Spirit Liberal-Institusionalisme: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic Equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Indonesian Perspective*, 8(1), 1-23. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.55088>.
- ASEAN Briefing. (2023). Indonesia's Breakthrough Year for Foreign Investment in 2022 [Online]. 28 February. Available at: <<https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-breakthrough-year-for-foreign-investment-in-2022/>> [accessed on 16 May 2025].
- Bijian, Z. (2005). China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status. *Foreign Affairs*, 84(5), 18–24. <https://doi.org/10.2307/20031702>.
- Callen, Tim. (2019). Gross Domestic Product: An Economy's All [Online]. 15 June. Available at : <<https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/gross-domestic-product-GDP>> [accessed on 20 May 2025].
- CNBC Indonesia. (2022). Pahit! RI Sudah Terjebak 29 Tahun Jadi Middle Income Country [Online]. 21 November. Available at: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221121105954-4-389770/pahit-ri-sudah-terjebak-29-tahun-jadi-middle-income-country>> [accessed on 4 April 2025].
- (2023). Demi KTT ASEAN, 2 Orang Kuat AS-China Merapat ke Jakarta [Online]. 6 September. Available at: <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230906144911-16-469903/demi-ktt-asean-2-orang-kuat-as-china-merapat-ke-jakarta>> [accessed on 28 November 2024].
- Country Economy. (n.d). Gross Domestic Product 2002 [Online]. <https://countryeconomy.com/gdp?year=2002>. Available at: <<https://countryeconomy.com/gdp?year=2002>> [accessed on 6 November 2024].
- Damuri, Y. R., Intan, R., & Rafitrandi, D. (2023). Strategic interests, regional integration and international economic policy in Indonesia. In S. ARMSTRONG, T. WESTLAND, & A. TRIGGS (Eds.), *Navigating Prosperity and Security in East Asia* (1st ed., pp. 119–142). ANU Press. <http://www.jstor.org/stable/jj.4688141.12>.

- Godement, F., Vendryes, T., Hongmei, M., Kratz, A., & Herrero, A. G. (2015). *CHINA: HITTING THE MIDDLE INCOME WALL*. European Council on Foreign Relations. <http://www.jstor.org/stable/resrep21532>.
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, 23(1), 171–200. <https://doi.org/10.2307/2539267>.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook 2023*. IMF, Washington.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*.
- Kemp Spiesm, Y. (2016). "Middle Power Diplomacy". *The SAGE Handbook of Diplomacy*. London: SAGE Publication Ltd.
- Keohane, R. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kompas. (2009). Pidato Lengkap Presiden SBY 20 Oktober 2009. 20 October 2009 [Online]. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/20/1324076/pidato.lengkap.presidenten.sby.20.oktober.2009> [accessed on 8 November 2024].
- Kumar Sahum, P. (2016). Insight Trans-Pacific Partnership: Should Indonesia join it or not?" [Online]. 18 February 2025. Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/insight-trans-pacific-partnership-should-indonesia-join-it-or-not.html> [accessed on 8 January 2025].
- Lake, D. A. (2003). The New Sovereignty in International Relations. *International Studies Review*, 5(3), 303–323. <http://www.jstor.org/stable/3186572>.
- Larson, D. W., & Shevchenko, A. (2010). Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy. *International Security*, 34(4), 63–95. <http://www.jstor.org/stable/40784562>.
- Lee, S.J., et al. (2015). *Middle Power in Action: The Evolving Nature of Diplomacy in the Age of Multilateralism*. EAI MPDI Special Report.
- Mearsheimer, J. J. (1994). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3), 5–49. <https://doi.org/10.2307/2539078>.
- MIKTA. (2020). *Fulfilling the Role of a Responsible Middle Power in the Service of World Peace and Prosperity*. MIKTA, Seoul.
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 51(4), 513–553. doi:10.1162/002081897550447.

- Narasi. (2025). Indonesia Akan Jadi Negara ASEAN Pertama Gabung OECD [Online]. 11 February 2025. Available at: <<https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-akan-jadi-negara-asean-pertama-gabung-oecd>> [accessed on 3 March 2025].
- Rosyidin, M. (2022). *Teori Hubungan Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- (2017). Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century. *South East Asia Research*, 25(2), 175–191. <https://doi.org/10.1177/0967828X17706570>
- Runde, D. F., Rice, C., & Yayboke, E. (2017). Executive Summary: Escaping the Middle-Income Trap. In *Innovation-Led Economic Growth: Transforming Tomorrow's Developing Economies through Technology and Innovation* (pp. viii–x). Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep23182.5>
- Santikajaya, A. (2017). Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise. *International Journal*, 71(4), 563–586. <https://doi.org/10.1177/0020702016686381> (Original work published 2016).
- Sarwidaningrum, Irene et. al. 2024. Indonesia Merangkul Afrika, Memperkuat Ketahanan Dunia Selatan [Online]. 1 September 2024. Available at: <<https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/09/01/indonesia-merangkul-afrika-memperkuat-ketahanan-dunia-selatan>> [accessed on 7 March 2025].
- Sekretariat Kabinet RI. 2015. Presiden Jokowi: Politik Indonesia Bebas Aktif, Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat [Online]. 30 Januari 2015. Available at: <<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-politik-indonesia-bebas-aktif-manfaatnya-harus-dirasakan-rakyat/>> [accessed on 27 November 2024].
- Sekretariat Negara RI. 2023. Indonesia Miliki Peluang Besar Raih Indonesia Emas 2045 [Online]. 16 August 2023. Available at: <https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_miliki_peluang_besar_raih_indonesia_emas_2046> [accessed on 3 December 2024].
- Sinaga, Nikson. 2023. Kunjungan Perdana ke Afrika, Presiden Jokowi Perkokoh Hubungan dengan Spirit Bandung [Online]. 10 August 2023. Available at: <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/20/kunjungan-perdana-ke-afrika-presiden-jokowi-perkokoh-hubungan-dengan-spirit-bandung>> [accessed on 3 December 2024].
- Singer, J. D. (1961). The Level-of-Analysis Problem in International Relations. *World Politics*, 14(1), 77–92. <https://doi.org/10.2307/2009557>.

- Statista. (n.d). Indonesia: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1988 to 2028 [Online]. Available at: <<https://www.statista.com/statistics/320142/gross-domestic-product-gdp-in-indonesia/>> [accessed on 27 December 2024].
- Tempo. (2023). Expert Talks of Impact of Indonesia's Return to Be Upper-middle-income Country [Online]. 6 Juni 2023. Available at: <<https://en.tempo.co/read/1745017/expert-talks-of-impact-of-indonesias-return-to-be-upper-middle-income-country>> [accessed on 21 December 2024].
- (2024). Industri Nikel di Halmahera Diduga Melanggar HAM dan Merusak Lingkungan [Online]. 18 January 2025. Available at: <<https://www.tempo.co/ekonomi/industri-nikel-di-halmahera-diduga-melanggar-ham-dan-merusak-lingkungan-96676>> [accessed on 7 May 2025].
- Trading Economics. (n.d). GDP G20 [Online]. Available at: <<https://tradingeconomics.com/country-list/gdp?continent=g20>> [accessed on 6 23 January 2025].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar negeri.
- US Embassy & Conulates in Indonesia. (n.d). Available at: <<https://id.usembassy.gov/the-trans-pacific-partnership-building-on-u-s-economic-and-strategic-partnerships-in-the-asia-pacific/>> [accessed on 16 November 2025].
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <http://www.jstor.org/stable/2706858>.
- Worldometers. (n.d). Indonesia GDP [Online]. Available at: <<https://www.worldometers.info/gdp/indonesia-gdp/>> [accessed on 19 November 2024].
- World Bank. (2023). A Longer View. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433.
- World Economics. (n.d). G20 [Online]. Available at: <<https://www.worldeconomics.com/Regions/G20/>> [accessed on 16 November 2024].
- World Integrated Trade Solution. (n.d). Indonesia Trade Summary 2022 Data [Online]. Available at:

<<https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IDN>> [accessed on 19 November 2024].